



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA
KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 6 DESEMBER 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2023**



**RANCANGAN JADWAL ACARA
TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 6-10 DESEMBER 2023**

NO.	HARI/TANGGAL	ACARA	KETERANGAN
01	Rabu, 6 Desember 2023		
	Pkl. 05.00 WIB	Anggota Tim Kunker sudah berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Terminal II	Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
	Pkl. 06.00 WIB	Take Off dari Bandara Internasional Soekarno Hatta	Dengan Pesawat Batik ID 6368
	Pkl. 07.10 WIB	Tiba Di Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulonprogo	
	Pkl.07-20-09.00 WIB	Perjalanan menuju UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penjemputan oleh Protokol
	Pkl.09.00-10.00 WIB	Sarapan Pagi	Dikoordinasikan oleh Pihak UIN Sunan Kalijaga Jogja
	Pkl. 10.00-12.00 WIB	Pertemuan dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ka.Kanwil Kemenag Provinsi Yogyakarta, Kadinsos, Kepala BBPPKS Regional III Yogyakarta, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala BPBD, Kepala BAZDA, Kepala BWI beserta jajaran, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Provinsi DIY.	Didampingi Eselon I/II Kemenag, Kemensos, BNPB, KPPPA, BPKH, BAZNAS, BWI
	Pkl. 12.00-13.00 WIB	Ishoma	Dikoordinasikan oleh Pihak Kemensos RI (BBPPKS Jogja)
	Pkl. 13.00-13.30 WIB	Perjalanan menuju BBPPKS Regional III Yogyakarta	
	Pkl.13.30-15.30 WIB	Peninjauan Lapangan dan Pertemuan di BBPPKS Regional III Yogyakarta	Pengawasan pembagian bantuan sosial Atensi dan BLT Elnino
	Pkl. 15.30-17.00 WIB	Perjalanan menuju Bandara YIA	Dikoordinasikan oleh Protokol
Pkl. 17.30 WIB	Take off dari Bandara YIA Kulonprogo	Dengan Batik Air ID 6377	
Pkl. 18.40 WIB	Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK)		

02	Kamis, 7 Desember 2023	
	07.00-09.00 WIB	Sarapan di Hotel
	09.00-12.00 WIB	Pengumpulan Kelengkapan Data ke BPBD, Dinsos, Kanwil Kemenag
	12.00-13.00 WIB	ISHOMA
	13.00.-17.00 WIB	Inventarisasi data hasil kunjungan
	17.00 WIB	Istirahat
	19.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
03	Jumat, 8 Desember 2023	
	07.00-09,00 WIB	Sarapan di Hotel
	09.00-12.00 WIB	Analisis Data Laporan Kunjungan
	12.00-13.00 WIB	ISHOMA
	13.00-17.00 WIB	Penyusunan Konsep Laporan Kunjungan
	17.00 WIB	Istirahat
	19.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
04	Sabtu, 9 Desember 2023	
	07.00-09.00 WIB	Sarapan di Hotel

	09.00-12.00 WIB	Perbaiki Hasil Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja	
	12.00-13.00 WIB	ISHOMA	
	13.00-17.00 WIB	Lanjutan Perbaiki Hasil Penyusunan Laporan Kunjungan Kerja	
	17.00 WIB	Istirahat	
	19.00 WIB	Makan Malam	
	21.00 WIB	Istirahat	
05	Minggu, 10 Desember 2023		
	07.00 WIB	Sarapan di hotel	
	09.00 WIB	Menuju Bandara YIA, kembali ke Jakarta	

Contact Person:

Nasir (0813 8123 7656)

Jody (0821 2772 5868)



**DAFTAR NAMA
KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI
PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
TANGGAL 6-10 DESEMBER 2023**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANG G				
1.	A-289	Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI	GOLKAR	JABAR II
2.	A-3	H. MARWAN DASOPANG	WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI	PKB	SUMUT II
3.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	ANGGOTA DPR RI	PDIP	DIY
4.	A-172	SELY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	ANGGOTA DPR RI	PDIP	JABAR VIII
5.	A-218	INA AMMANIA	ANGGOTA DPR RI	PDIP	JATIM VII
6.	A-225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	ANGGOTA DPR RI	PDIP	BANTEN I
7.	A-275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.	ANGGOTA DPR RI	GOLKAR	JAMBI
8.	A-304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.	ANGGOTA DPR RI	GOLKAR	JATENG IV
9.	A-062	H. M. HUSNI, S.E., M.M.	ANGGOTA DPR RI	GERINDRA	SUMUT I
10.	A-089	H. OBON TABRONI	ANGGOTA DPR RI	GERINDRA	JABAR VII
11.	A-014	H. MAMAN IMANUL HAQ	ANGGOTA DPR RI	PKB	JABAR IX
12.	A-371	Hj. SRI WULAN, S.E.	ANGGOTA DPR RI	NASDEM	JATENG III
13.	A-552	WASTAM	ANGGOTA DPR RI	DEMOKRAT	JATENG VIII
14.	A-529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	ANGGOTA DPR RI	DEMOKRAT	RIAU I
15.	A-438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	ANGGOTA DPR RI	PKS	JABAR X
16.	A-434	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.	ANGGOTA DPR RI	PKS	JABAR VI
17.	A-509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt	ANGGOTA DPR RI	PAN	BANTEN II
18.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
19.	-	MUHAMMAD NASIR, ST., M.Si.			
20.	-	MARDIYANA			
21.	-	JODY PRATAMA PUTRA			
22.	-	SURATMAN, S.H.,M.H.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
23.	-	HARJA SAPUTRA, S.SOS.I, MM			
24.	-	DIPA NATALIO	MEDIA DPR RI		

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja, yaitu : Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Keputusan Pimpinan DPR-RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dan Keputusan Rapat internal Komisi VIII DPR-RI.

C. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pelaksanaan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat RI yang antara lain : *Pertama*, Penyerapan berbagai aspirasi masyarakat dalam bidang Legislasi. Sebagaimana diketahui bahwa pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024

Kedua, Pengawasan pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran pemerintah dari APBN tahun 2023-2024; *Ketiga*, Penyerapan aspirasi masyarakat atas Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka pembahasan pengawasan kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan APBN Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Kebijakan anggaran (*budget policy*) DPR RI.

Kunjungan Kerja ini berlangsung dari tanggal 6-10 Desember 2023, yang diikuti oleh 2 Pimpinan dan 15 anggota

Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Sedangkan Bidang-bidang yang menjadi konsentrasi Kunjungan Kerja meliputi (1) Bidang Agama; (2) Bidang Kesejahteraan Sosial; (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan (4) Bidang Perlindungan Anak, (5) Penanggulangan Bencana; Bidang Pengelolaan Keuangan Haji dan (6) Bidang Pengelolaan Zakat.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan Unsur Pemerintahan, SKPD, dan melakukan peninjauan lapangan

BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Ke UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Peran negara sangatlah penting dalam membangun dan mengembangkan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Mengingat salah satu semangat berdirinya perguruan tinggi Islam ialah menghasilkan banyak para ulama. Oleh karena itu UIN Sunan Kalijaga DIY harus bisa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan.

IN diharapkan menghasilkan banyak intelektual publik yang sekaligus dapat melahirkan pemikiran-pemikiran terkait perubahan. Dengan cara memasukkan nilai kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan, kiranya bisa membuat mahasiswa tidak hanya cerdas, tetapi juga humanis.



Disamping itu peningkatan anggaran riset juga perlu diupayakan. Kemudian, pemberian beasiswa untuk mencagai target daripada kampus ini, yaitu mencetak ulama dan cendikiawan skala nasional, bahkan internasional. Supaya keinginan menjadi pusat riset Islam yang terdepan dapat terlaksana.

UIN harus menjadi pusat riset Islam terdepan dapat terlaksana. Kemudian, beasiswa perlu didukung dengan tujuan melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan

moderat. Melihat kebutuhan terhadap ulama dan cendekiawan skala nasional dan internasional saat ini sangat dibutuhkan. Terkait perencanaan produk-produk baru seperti target prodi di UIN Sunan Kalijaga DIY ini sudah terpenuhi sesuai Undang-Undang. Oleh karena itu perlu diupayakan secara terus menerus adanya perencanaan produk-produk baru yang sudah ada, berdasarkan paparan memang sudah ada 66 prodi (sesuai target Undang-Undang). Namun, perlu ada peningkatan pada fakultas, seperti fakultas syariah, dakwah. Di mana seharusnya mahasiswa bisa menguasai bahasa Arab, sehingga bisa menciptakan ulama yang berkualitas. Melihat semakin kesini, minat mahasiswa untuk menjadi ulama semakin pudar.

Dalam dialog UIN diharapkan mampu berkontribusi agar bangsa Indonesia tidak kehilangan akarnya sebagai bangsa yang religius. Perlu didorong bagaimana Islam khas Indonesia ini justru terus dilahirkan dari perguruan-perguruan tinggi.

Kunjungan ke BBPPKS

Komisi VIII DPR RI pastikan bahwa bantuan sosial yang dialokasikan Kementerian Sosial ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepat guna dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Komisi VIII DPR RI mendorong agar bantuan sosial ini bisa digunakan masyarakat sesuai peruntukannya.

Beberapa bantuan sosial seperti program keluarga harapan, kartu sembako, asistensi rehabilitas sosial, kami pastikan agar targetnya sesuai. Jika Program Keluarga Harapan (PKH) untuk anak-anak, tentu harus dibelikan seragam, alat-alat sekolah, perlengkapan sekolah. Jika bantuan tersebut untuk lansia, tentu harus sesuai kebutuhan lansia.



Komisi VIII DPR RI juga mengharapkan kepada Perangkat Daerah berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan warganya. Terutama masyarakat pra sejahtera yang dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Guna mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan, seluruh Perangkat Daerah harus memiliki Call Center, termasuk Dinas Sosial. Mereka harus berperan dalam hal memperbarui data-data penerima bantuan sosial, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan

Struktur organisasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas
 1. Subbagian Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemenuhan hak anak untuk meningkatkan hak anak yang terpenuhi;

- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak untuk mengendalikan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengendalikan rata-rata jumlah anak per keluarga; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi Sarana dan Prasarana:

Untuk tanah dan bangunan diupayakan untuk selalu memenuhi standar dalam pelayanan, yang belum terpenuhi adalah ruangan konseling yang kedap suara sudah beberapa kali diusulkan namun belum mendapat alokasi anggaran dari APBD Untuk kelayakan kendaraan dinas dalam penjangkauan kasus sebenarnya perlu mendapat perhatian karena kendaraan dinas masih ada yang keluaran tahun 2009

3. ANGGARAN/REALISASI DANA DAN KEGIATAN

- 1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga anggaran Rp3.000.000, terealisasi sebesar Rp2.700.000 (90%)
- 2. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp1.500.000, terealisasi sebesar Rp1.500.000 (100%)
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi anggaran sebesar Rp1.500.000, terealisasi sebesar Rp1.500.000 (100%)
- 4. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp750.000, terealisasi sebesar Rp375.000 (50%)



No	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Kualitas Perempuan yang perlu di tingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Kesempatan perempuan terbuka untuk duduk dalam jabatan publik
2	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak dalam Forum perlindungan korban kekerasan (FPKK)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembiayaan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah dan kualitas kekerasan terhadap perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kesadaran perempuan untuk melaporkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Puspaga dan UPT BPPA
5	<ul style="list-style-type: none"> • Maraknya kekerasan anak di jalanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya kekerasan anak dengan pelaku anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Puspaga dan UPT BPPA di DIY dan Kab / kota

BPBD DIY

Rencana tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi DIY. Program Kesiapsiagaan telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yaitu Penilaian Risiko (risk assessment), Perencanaan siaga (contingency planning), Mobilisasi sumberdaya (resource mobilization), Pendidikan dan Pelatihan (training & education), Koordinasi (coordination), Manajemen Darurat (response mechanism), Peringatan Dini (early warning), Manajemen Informasi (information systems), dan Gladi/Simulasi (drilling/simulation). Kegiatan tersebut diatas dirinci lagi dengan berbagai sub kegiatan yang lebih teknis dan operasional. Rencana Aksi Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana yang merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah dimasukkan dan diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) baik ditingkat Pemerintah daerah maupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah di DIY baik dalam perencanaan dan penganggarannya.

Kesiapan logistik diupayakan dengan senantiasa siap dengan buffer stock di gudang penyimpanan, yang sewaktu-waktu dapat di salurkan. Senantiasa berkoordinasi dengan BPBD kab/ko dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan logistik. BPBD DIY terus memberikan bantuan logistik ke kab/ko sesuai dengan yang mereka butuhkan yang disesuaikan dengan kondisi persediaan di gudang. Logistik ini berasal dari anggaran rutin BPBD DIY serta bantuan dari BNPB. Tahun ini dan tahun 2024 jumlah anggaran untuk kebutuhan logistik sangat minim. Apabila terjadi bencana dan ditetapkan keadaan darurat maka anggaran juga diambilkan dari dana BTT

Anggaran utk program penanggulangan bencana di DIY, sangat minim dan terbatas :

- Anggaran BPBD DiY 2023 : 23, 3 M - Anggaran 2024 ; 15, 7 M Terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan

Permasalahan dan kendala :

1. Masih terbatasnya : sarpras, kompetensi SDM, anggaran
2. Data sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena dari data kita dapat membuat analisis lanjutan maupun berbagai macam visualisasi, namun data kejadian bencana sendiri sampai hari ini masih berbeda-beda antara yang dimiliki provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga perlu adanya satu kesepakatan yang dipayungi secara hukum, agar apa yang menjadi kesepakatan dapat dilaksanakan. Keterbatasan SDM yang dimiliki kabupaten/kota juga menjadi permasalahan tersendiri, karena di beberapa

BPBD kabupaten untuk pengolah datanya hanya 1 orang, hal tersebut menjadi hambatan dalam penyampaian data bencana dari kabupaten ke provinsi.

3. Jenis dan kejadian bencana di DIY trennya meningkat dengan timbulnya potensi-potensi baru. Prabencana; Upaya menggeser paradigma PB kearah upaya preventif (Pencegahan dan Kesiapsiagaan) dan partisipatif (pelibatan multipihak/pentahelix) belum berjalan dengan baik yang dibarengi alokasi resourssis (SDM, Sarpras dan Anggaran); sehingga filosofi Menjauhkan bencana dari masyarakat, menjauhkan masyarakat dari bencana dan hidup harmoni ditengah potensi bencana belum maksimal, 9 indikator Kesiapsiagaan juga belum implementatif.
4. Penyusunan rencana kontijensi untuk semua potensi bencana belum dilakukan, saat ini baru 4 renkon dari 14 potensi sesuai RPB, dan yang sudah disusun saat ini belum pernah direview.
5. Diklat kebencanaan juga belum menjadi mandatori OPD Bandiklat.
6. Saat kejadian bencana belum terorquestra dengan baik khususnya aktivasi 9 klaster PB
7. Mobilisasi potensi unsur masyarakat, dunia usaha juga belum terkoordinir dengan baik, akademisi dan media juga belum sepenuhnya masuk tim penanganan darurat.
8. Pasca Bencana perlu ada kebijakan manajemen recovery, rehabilitasi bukan hanya pada fisik tapi psikis..rekonstruksi juga vital melibatkan para pakar yang benar-benar kompeten, bukan sebatas melibatkan pihak Ketiga/Tender.

BAB III PENUTUP

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kunjungan kerja, dapat dicatat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu upaya meningkatkan layanan kesejahteraan sosial yang didukung kualitas SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi dan lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.
2. Perlu adanya penambahan indeks bagi penerima manfaat sebesar 2,4 juta
3. Perlu adanya pemetaan terhadap peningkatan mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta membutuhkan dukungan dana guna pembangunan kampus II di atas lahan seluas 76 Ha.
5. UIN Sunan Kalijaga juga memerlukan penguatan sebagai badan hukum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum .
6. Layanan bagi Mahasiswa Difabel sebanyak 125 mahasiswa perlu mendapat perhatian
7. Perlu percepatan pembangunan asrama haji yang sebagai lahan dan anggarannya sdh tersedia.
8. MUI menyampaikan aspirasi pentingnya pengaturan jemaah haji yang waktu tunggu mencapai 34 tahun, layanan bagi jemaah haji lanjut usia.
9. BPBD DIY mengharapkan dukungan program dan anggaran dari BNPB yang digunakan untuk meningkatkan earling warning system.
10. FKUB DIY mengharapkan perhatian pengelolaan cagar budaya Candi Prambanan disinkronkan dengan kepetingan ibadah, yaitu yang hendak beribadah/persembahyangan di Candi Prambanan tidak dikenakan biaya.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas Konstitusional.

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR-RI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

